

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan politik di Indonesia menjadi topik yang menarik perhatian, terutama dalam konteks perebutan jabatan politik. Kepemimpinan politik kerap mengalami berbagai dinamika seiring dengan berkembangnya demokrasi. Pada sistem politik, kepemimpinan sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola pemerintahan, mengambil kebijakan, dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Kepemimpinan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor formal seperti jabatan dan wewenang, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, serta ekonomi yang membentuk persepsi masyarakat terhadap seorang pemimpin (Budiardjo, 2008).

Pelaksanaan pemilihan pemimpin suatu daerah menjadi suatu proses dalam demokrasi. Indonesia telah menggelar pemilihan secara langsung baik dari tingkat nasional hingga daerah, termasuk desa. Pemilihan yang dilakukan secara langsung ini dikenal sebagai Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentunya melaksanakan pemilihan langsung ini, hal ini diperkuat dengan statement bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, yang berarti rakyat memiliki kekuatan dan memiliki hak penuh dalam menentukan atau memilih seorang pemimpin (Muhammad, 2016).

Pada konteks politik lokal, kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan sebuah desa dan mewakili kepentingan masyarakat di tingkat pemerintahan terdekat. Pemilihan kepala desa dilakukan

secara langsung oleh masyarakat desa karena desa memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan kelurahan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹, yang menjelaskan jika masyarakat desa berhak memilih pemimpinnya sendiri, hal ini berbeda dengan kelurahan yang dipimpin oleh lurah yang merupakan pejabat pemerintahan yang berada di bawah kendali pemerintah kota dan diangkat langsung oleh walikota karena kelurahan adalah bagian birokrasi pemerintahan daerah bukan entitas otonom seperti desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah², yang menegaskan bahwa kelurahan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada camat, sedangkan desa adalah pemerintahan tersendiri yang berdiri secara otonom.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan mekanisme demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung. Namun, pada praktiknya, pemilihan ini kerap dipengaruhi oleh kepentingan elite lokal yang memiliki sumber daya baik ekonomi maupun politik yang nantinya menentukan hasil pemilihan. Hadirnya elite-elite lokal ini memberikan kesempatan untuk menjadi raja-raja kecil yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Implikasi negatif dari hal ini adalah banyak kepala daerah yang akhirnya membangun suatu dinasti politik yang kemudian bisa berakhir ditangkap karena melakukan tindak korupsi³. Elite politik disini ialah para pengusaha maupun

¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³ Muhammad (2016), korupsi terjadi ketika kepala daerah berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dari dana pribadi atau bantuan dari investor. Mereka berusaha mengembalikan modal saat pemilihan dari hasil korupsi uang APBD. Bila modal telah selesai terbayarkan, maka

perorangan yang mendanai kandidat calon kepala desa pada saat masa pemilihan. Hal ini dilakukan karena biasanya calon atau kandidat tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi biaya kegiatan selama pemilihan yang memerlukan biaya cukup besar. Timbal balik yang diterima dari jasa para elite ini adalah kepala desa yang terpilih akan memberikan hak istimewa, biasanya adalah perlindungan ekonomi dan politik terhadap usaha usaha mereka (Muhammad, 2016).

Kepemimpinan kepala desa perempuan masih menjadi isu yang kompleks, berbagai hambatan kerap dirasakan oleh kepala desa perempuan, salah satunya oleh budaya patriarki⁴ yang telah mengakar di masyarakat. Beberapa studi mencatat bahwa perempuan yang terjun ke dalam dunia politik sering menghadapi stereotip negatif, seperti sering dianggap kurang tegas atau kurang kompeten dalam mengambil keputusan. Selain itu, peran domestik yang masih melekat pada perempuan sering menjadi hambatan pada upayanya untuk mengembangkan karir politik. Meski begitu, terdapat pula beberapa perempuan yang mampu menembus hambatan ini dan meraih posisi kepemimpinan di tingkat lokal, termasuk pada pemilihan kepala desa (Handayani & Paramita (2019), Nurhidayat & Suryani (2021), Walby (1990).

Selain hal itu, pemilihan kepala desa (Pilkades) menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan pemimpin yang akan mengelola desa. Undang-Undang

mereka akan mengumpulkan modal untuk dirinya sendiri guna memenangkan pemilihan selanjutnya.

⁴ Sylvia Walby (1990), patriarki adalah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

(UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa⁵, menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Kepala desa memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali melibatkan peran aktor lokal yang memiliki pengaruh (*local strongman*) yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik dalam menentukan hasil pemilihan kepala desa. Mereka terlibat dalam praktik patronase, yaitu hubungan saling menguntungkan antara calon dan pemberi dukungan (Hidayat et al., 2018).

Salah satu fenomena menarik adalah kemenangan Elin Herlina dalam Pemilihan Kepala Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, pada tahun 2014 dan 2021. Elin adalah perempuan pertama yang berhasil terpilih sebagai kepala desa di wilayah tersebut dan mampu mempertahankan jabatannya selama dua periode berturut turut. Melansir data dari arsip desa Cikoneng, daftar kepala desa yang menjabat pada periode-periode sebelum Elin Herlina, yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1 Daftar Nama Kepala Desa Cikoneng

No	Nama Kepala Desa	Periode
1	Gandawijaya	1958-1965
2	Oma Suhana	1965-1971
3	SH Poniman	1971-1984
4	Kiking SH Poniman	1984-1993
5	Koko HS	1993-2001
6	Pjs M Toha	2001-2002

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024> pada 20 Februari 2025.

7	Jaja Martha	2002-2008
8	Jaja Martha	2008-2014
9	Elin Herlina	2014-2020
10	Pjs Dr. H. Anto Risyanto, M.Pd	2020-2021
11	Elin Herlina	2021-2029

Sumber: Arsip Desa Cikoneng

Dapat dilihat Elin Herlina menjadi kepala desa perempuan pertama setelah sebelumnya selalu laki-laki. Elin Herlina merupakan warga pendatang dari Tasikmalaya dan menetap di Cikoneng. Meski bukan warga asli, Elin Herlina tetap ingin memiliki kegiatan aktif di lingkungan masyarakat. Ia aktif menjadi kader posyandu, mendirikan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), menjadi koordinator Pos KB Kecamatan, hingga menjadi guru di SLB (Sekolah Luar Biasa) Cikoneng. Keaktifannya di masyarakat disambut baik, hingga ia terpilih menjadi kepala dusun Pasar Salasa pada tahun 2007 hingga 2014 yang membawahi 10 RT dan 3 RW.

Diakhir masa jabatannya sebagai kepala dusun, ia akhirnya mencalonkan diri sebagai calon kepala desa untuk periode tahun 2014-2020. Pada saat pemilihan, calon yang mendaftarkan diri berjumlah 5 orang, dimana 3 calon laki-laki dan 2 calon perempuan. Perolehan suara Elin Herlina menang telak pada pemilihan ini dibandingkan dengan 4 calon lainnya. Kemudian, pada tahun 2021, pasca pandemi Pilkadaes kembali di gelar di Desa Cikoneng. Melansir dari arsip resmi desa Cikoneng, kandidat yang mencalonkan diri pada Pilkadaes ini kembali di dominasi oleh laki-laki dan hanya Elin Herlina saja yang seorang perempuan. Berikut hasil

rekapitulasi perolehan suara pada kegiatan pemilihan kepala desa serentak di desa Cikoneng Kabupaten Ciamis tahun 2021.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pemungutan Suara Tahun 2021

No Urut	Nama Calon	Jumlah Suara	Rank
1	Ade Tohari	359	4
2	Cecep Sujana	1.466	2
3	Fajar Predian	143	5
4	Elin Herlina	1.506	1
5	M. Subastian M.	411	3
Jumlah Suara Sah		3.885	
Jumlah Suara Tidak Sah		73	
Jumlah Suara		3.958	
Jumlah DPT		5.685	

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Cikoneng Tahun 2021

Keberhasilannya menjadi kepala desa dua kali secara berturut-turut ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena meskipun menghadapi empat kandidat laki-laki, Elin Herlina kembali berhasil memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 1.506 suara, unggul signifikan dari pesaing lainnya (Arsip Pemerintah Desa Cikoneng, 2020). Penelitian ini akan mengungkap keterlibatan jaringan elite lokal dalam kemenangan Elin Herlina pada dua periode kepemimpinannya, dan penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik politik patronase bekerja dalam relasi kuasa antara calon kepala desa dan pendukungnya di tingkat lokal.

Menurut pendapat salah satu warga⁶, menjelaskan jika pada dasarnya keterpilihan Elin Herlina sebagai kepala desa menuai pro dan kontra, hal ini karena terpilihnya seorang perempuan menjadi kepala desa di daerah itu bukanlah sesuatu yang umum. Ditambah lagi menurutnya masyarakat desa Cikoneng lebih senang jika pemimpin desa adalah seorang laki-laki karena merasa jika pemimpin desa perempuan memiliki sikap yang kurang tegas dalam memimpin.

Pada Pilkades Cikoneng tahun 2021, Elin Herlina harus bersaing dengan empat kandidat laki-laki dimana dari keempat kandidat tersebut, Cecep Sujana menjadi lawan terkuat dengan selisih perolehan suara yang sangat tipis, yaitu hanya terpaut 40 suara. Menurut pandangan ketua RT 01 Dusun Pasar Saptu⁷, menuturkan bahwa Cecep sendiri sempat melakukan pembagian sembako pada masa kampanye terhadap masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu di Dusun Ciangini. Hal ini menunjukkan adanya indikasi politik transaksional dalam kontestasi Pilkades tersebut, dimana kandidat berupaya menarik dukungan dengan memberikan bantuan materi kepada masyarakat.

Sebagai lawan politik terkuat Elin Herlina dalam Pilkades Cikoneng tahun 2021, Cecep Sujana⁸ mengungkapkan bahwa dirinya dicalonkan oleh beberapa kepala dusun untuk maju dalam pemilihan kepala desa saat masih menjabat sebagai Kepala Dusun Ciangini. Dalam konteks strategi politik, Cecep mengungkapkan bahwa beberapa kandidat lain dalam Pilkades 2021 melakukan praktik "serangan fajar," yakni pembagian uang kepada masyarakat sehari sebelum pemungutan suara

⁶ Wawancara dengan Jajang, warga Desa Cikoneng, ditemui oleh penulis pada 21 Februari 2025.

⁷ Wawancara dengan Hedi, Ketua RT 01 RW 05 Dusun Pasar Saptu, ditemui pada 21 Februari 2025

⁸ Wawancara dengan lawan politik Elin Herlina, yaitu Cecep Sujana, untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif terkait kemenangan Elin Herlina, ditemui penulis pada 26 Februari 2025.

sebagai bentuk politik transaksional. Namun, Cecep sendiri mengaku tidak melakukan strategi serupa karena keterbatasan dana. Meskipun demikian, ia menuturkan adanya indikasi bahwa Elin Herlina dibantu oleh segelintir elite pada masa pemilihannya. Elite lokal yang membantu Elin ini menjadi salah satu bagian dari tim suksesnya, seperti yang disampaikan oleh Cecep bahwa salah satu tim sukses melakukan pembagian uang dan penawaran pemasangan token PLN gratis kepada masyarakat dengan syarat mendukung Elin dalam pemilihan. Selain itu, Cecep juga menyinggung adanya dukungan finansial besar bagi Elin Herlina, salah satunya dari seorang pendukung bernama Edi, yang dikabarkan memberikan modal sebesar Rp. 60 juta untuk kemenangan Elin. Bahkan, Cecep juga menyebut adanya kontrak politik antara Elin Herlina dengan pihak tertentu, termasuk dengan anggota dewan dari partai PPP bernama Toni dan pengusaha plastik Uniko, bernama Andi.

Keterangan lain di dapatkan dari anggota tim sukses Elin Herlina bernama Edi⁹, yang menjelaskan bahwa ia mendukung Elin dengan syarat ingin mendapatkan infrastruktur jalan untuk masyarakat yang ingin pergi ke sawah dan ingin diberi pemasangan sumur bor di wilayah dusun tempat tinggalnya yaitu Pasar Saptu. Perannya dalam mensukseskan kemenangan Elin dilakukannya dengan memberikan penawaran kepada warga masyarakat melalui profesinya sebagai pegawai PLN, yaitu akan memasang token listrik gratis dengan syarat memilih Elin Herlina pada saat pemilihan kepala desa. Menurutnya biaya pemasangan listrik berdaya 900W saat ini adalah yang paling rendah dan biaya pemasangannya bisa

⁹ Wawancara dengan Edi anggota tim sukses Elin Herlina yang berprofesi sebagai pegawai PLN, dan mengakui melakukan politik transaksional kepada beberapa warga yang rumahnya ingin memasang token listrik secara gratis dengan syarat memilih Elin Herlina pada saat pemilihan, ditemui oleh penulis pada 16 Maret 2025.

mencapai satu juta rupiah belum termasuk biaya lainnya, dan seluruh biaya yang dikeluarkan berasal dari dana pribadi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses seperti penerangan jalan di gang-gang sekitar rumah warga dusun pasar saptu. Edi melakukan strategi kampanye dengan upaya mobilisasi dan pendekatan kepada masyarakat guna meraih dukungan dilakukan dengan penyebaran informasi di tiga dusun, yaitu Pasar Saptu, Babakan, dan Awipari. Hal inilah yang membuatnya memiliki basis massa yang cukup banyak untuk mendukung Elin Herlina.

Informasi lainnya didapatkan dari ketua tim sukses Elin Herlina yaitu Warli¹⁰, yang memaparkan bahwa sumber pendanaan kampanye Elin Herlina pada masa kampanye bersumber dari dana pribadi sebesar seratus juta rupiah dan dana patungan dari tim sukses. Selain itu, tim sukses Elin Herlina juga memperoleh dukungan finansial dari sumbangan anggota DPRD Kabupaten Ciamis, yaitu Toni dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Haji Abu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Warli, selaku ketua tim sukses, memiliki kedekatan dengan kedua anggota dewan tersebut, mengingat dirinya sebelumnya pernah menjadi tim sukses bagi keduanya pada pemilihan legislatif tahun 2019. Keberhasilannya dalam memenangkan mereka hingga bisa duduk di DPRD mempermudah aksesnya untuk memperoleh dukungan finansial bagi kampanye Elin Herlina pada Pilkadaes 2021.

Dalam pelaksanaan kampanye, tim sukses Elin Herlina disebar ke seluruh dusun di Desa Cikoneng, yang berjumlah 6 dusun yang memiliki total 14 RW dan 40 RT.

¹⁰ Wawancara dengan Warli, ketua tim sukses Elin Herlina berprofesi sebagai pengusaha ternak sapi, beliau telah menjadi ketua tim pemenangan Elin Herlina sejak masa periode pertama yaitu 2014-2020, ditemui oleh penulis pada 16 Maret 2025.

Warli secara aktif memobilisasi anggotanya untuk melakukan strategi kampanye berbasis komunikasi interpersonal, seperti "bisik-bisik" atau penyebaran informasi secara langsung mengenai visi, misi, serta keunggulan Elin Herlina kepada masyarakat di setiap dusun. Kemampuan Warli dan tim dalam melakukan pendekatan, lobi, serta persuasi terhadap masyarakat menjadikan mereka memiliki basis massa yang luas dan kuat di hampir seluruh wilayah desa.

Dukungan yang dilakukan oleh elite lokal dan anggota DPRD kepada Elin Herlina menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri dalam penelitian ini. Pola hubungan yang terjalin antara Elin Herlina dan para pendukung kuatnya meunjukkan adanya praktik politik patronase, dimana dukungan politik dibalas dengan pemberian akses atau keuntungan tertentu. Hal ini terlihat dari pemberian token listrik, bantuan penerangan jalan, dan proyek infrastruktur yang menjadi timbal balik atas dukungan politik yang diberikan. Fenomena ini menjadi fokus penting dalam penelitian untuk menelusuri bagaimana relasi kuasa antara Elin Herlina dan *local strongman* terbentuk dan di kelola dalam kontestasi politik desa. Dugaan awal dalam penelitian ini adalah elite lokal mendukung Elin Herlina sebagai strategi untuk memperoleh akses terhadap kebijakan dan sumber daya desa setelah pemilihan dimenangkan oleh Elin.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor ini, penelitian berfokus pada menganalisis bagaimana praktik politik patronase membentuk relasi kuasa antara Elin Herlina dan para *local strongman* dalam proses kemenangannya di Pilkades Cikoneng tahun 2014 dan 2021. Sejumlah penelitian terdahulu juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan kepala desa di berbagai daerah.

Anggoro (2019) memaparkan dalam penelitiannya mengenai fenomena purnawirawan TNI menerapkan praktik politik patronase dan klientelisme dalam kampanye sebagai calon legislatif di Kota Banjar, Jawa Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan politik dibangun melalui pemberian pribadi, janji proyek, dan pemanfaatan jaringan sosial yang dimiliki saat masih aktif di militer. Meidita Lestari (2021) mengkaji mengenai peran kepala desa sebagai *local strongman* yang terlibat dalam praktik politik patronase untuk mendukung calon bupati. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kepala desa menggunakan kekuatan ekonomi dan jabatannya untuk memengaruhi pilihan politik warga melalui politik uang dan mobilisasi massa. Susanto (2020) menyoroti tentang dominasi elite lokal dan tokoh agama dalam mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa. Dukungan politik yang diberikan oleh elite lokal dilakukan melalui pemberian bantuan, tekanan sosial terhadap masyarakat, serta mobilisasi suara melalui suara melalui jaringan kerja dan relasi religius.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggoro (2019), Meidita Lestari (2021), dan Susanto (2020) yang dijadikan rujukan memiliki kesamaan dalam membahas praktik patronase dan klientelisme dalam konteks politik lokal. Namun terdapat sejumlah perbedaan penting yang menjadi celah atau *gap research* dan sekaligus memperkuat urgensi dari penelitian ini. Anggoro menyoroti tentang praktik patronase dalam pemilihan legislatif oleh purnawirawan TNI. Fokus penelitian ini pada caleg DPRD, bukan pemilihan kepala desa, dan aktor utama yang diteliti ialah tokoh militer bukan elite lokal desa seperti pada penelitian yang akan dilakukan ini, Lestari menunjukkan peran kepala desa sebagai patron dalam

mendukung calon bupati, relasi kuasa yang dikaji bersifat top-down dari kepala desa ke warga yang mana berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada hubungan timbal balik antara calon kepala desa dan *local strongman*. Sedangkan Susanto menyoroti peran tokoh agama dan elite politik dalam mempengaruhi masyarakat pada Pilkades. Penelitiannya lebih menekankan mobilisasi suara oleh elite, sedangkan penelitian ini meneliti dukungan elite kepada calon dan timbal balik pasca kemenangan.

Perbedaan atau *gap research* dari penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana praktik politik patronase membentuk relasi kuasa antara calon kepala desa dan elite lokal pendukungnya di tingkat desa. Penelitian ini berfokus pada hubungan timbal balik antara Elin Herlina dan para *local strongman* dalam dua periode Pilkades, serta bagaimana bentuk dukungan tersebut berdampak pada pembagian akses kekuasaan setelah Elin terpilih. Penelitian ini juga menambah konteks kepemimpinan perempuan dalam struktur politik desa yang di dominasi oleh laki-laki. Sehingga penelitian ini akan mengisi celah penelitian terdahulu dengan melihat bagaimana praktik politik patronase membentuk relasi kuasa antara Elin Herlina sebagai calon kepala desa dan *local strongman* dalam konteks politik desa. *Novelty* atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap hubungan timbal balik antara Elin Herlina dan para elite lokal yang mendukungnya dalam dua periode Pilkades, dan bagaimana dukungan ini dibalas dengan memberi akses atau keuntungan setelah Elin Herlina terpilih. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai peran perempuan dalam dinamika politik patronase di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana bentuk relasi kuasa *local strongman* berperan dalam kemenangan Elin Herlina pada Pilkades Cikoneng tahun 2021?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk relasi kuasa *local strongman* berperan dalam kemenangan Elin Herlina pada Pilkades Cikoneng tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini terbagi menjadi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam memahami praktik politik patronase dan klientelisme di tingkat lokal. Dengan menggunakan studi kasus Pilkades Cikoneng, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana relasi kuasa antara calon kepala desa dan elite lokal terbentuk serta bagaimana praktik patron-klien dijalankan dalam konteks demokrasi desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan pada studi tentang kepemimpinan perempuan dalam struktur politik lokal yang didominasi oleh laki-laki.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada calon kepala desa tentang pentingnya membangun relasi politik yang sehat dengan tokoh-tokoh berpengaruh di desa.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyelenggara Pilkades dalam memahami pola dukungan elite lokal dan dampaknya terhadap demokrasi desa.
- 3) Penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat desa untuk lebih kritis terhadap praktik politik patronase yang terjadi dalam proses Pilkades.